



**KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PUNDATA BAJI**  
**NOMOR: 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS**  
**KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG**  
**KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KELURAHAN PUNDATA BAJI,**

- Menimbang :**
- Bahwa penyakit Tuberculosis adalah masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
  - Bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberculosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis Kelurahan Pundata Baji;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Pundata Baji;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Benta Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45).

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PUNDATA BAJI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG
------------	--

		KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KESATU	:	Menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Pundata Baji, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Kelurahan ini;
KEDUA	:	Tim Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan, Menynergikan, Melaksanakan, Dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di tingkat Kelurahan Pundata Baji secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
KETIGA	:	Biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah untuk unsur di luar Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
KEEMPAT	:	Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kelurahan ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini.
KELIMA	:	Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PUNDATA BAJI

Pada Tanggal : 2025

**KEPALA KELURAHAN PUNDATA BAJI**



**MUH. NASIR B**

Tembusan :

1. Sdr.Camat Labakkang
2. Sdri.Kepala Puskesmas Pundata Baji
3. Sdr.Ketua LPMD Borimasunggu

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Pundata Baji  
Nomor : 25 Tahun 2025  
Tanggal : 21 Juli 2025  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN ELIMINASI  
TUBERKULOSIS KELURAHAN PUNDATA BAJI

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS  
KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- I. **TIM PENGARAH**
1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
  2. Sekretaris Daerah
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota
  5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
  7. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
- II. **TIM PENGAWAS**
1. Kepala Kecamatan Labakkang
  2. Kepala Kepolisian Sektor
  3. Komandan Rayon Militer
  4. Kepala UPT Puskesmas Pundata Baji
- III. **TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC**
- Ketua Pelaksana**  
Kepala Kelurahan Pundata Baji : Muh. Nasir B, SE
- Wakil Ketua Pelaksana**
1. Sekretaris Lurah
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Anggota Pelaksana**
1. Kepala seksi keamanan dan ketertiban
  2. Bidan Desa
  3. Babinsa
  4. Bhabinkamtibmas
  5. Ketua TP PKK Kelurahan
  6. Ketua RT dan RW
  7. Posyandu (6 SPM)
  8. Kader dan Komunitas
  9. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
  10. Karang Taruna
  11. Satuan Pendidikan

**KEPALA KELURAHAN PUNDATA BAJI**



**MUH. NASIR B**